

PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA AMBON

Derek Bakarbessy
FISIP UKIM AMBON
Derekbakarbess.ukim@gmail.com

Abstract

This study aims to find out informal sector workers in Ambon city through case study. Determination of stratified random samples by first making the population classification according to certain characteristics and after that determined the number of samples with randomly selected system of 211 people, consisting of: people, seller drinks 109 people, fruit vendors 41, meatball seller 45 people. The data were analyzed quantitatively, in order to find out the utilization rate of labor force in the informal sector under study, the approach of the "Labor Utilization Approach" theory was used. The informal sector, whether viewed from the perspective of income, working hours, or education, is in a state of "adequate utilization". The informal sector workers in carrying out their business have earned some of the income they use to support their families and continue their business. The informal sector in maintaining its existence faces various problems. A particularly prominent problem is the lack of capital, the place of business, and the marketing of results.

Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan penambahan jumlah angkatan kerja. Pertambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja akan menimbulkan pertambahan jumlah pengangguran.

Meningkatnya perkembangan angkatan kerja di kota disebabkan oleh berbagai hal, disamping oleh pertambahan penduduk secara alamiah (*natural increase*), juga disebabkan oleh arus urbanisasi. Peningkatan angkatan kerja ini tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga mereka yang tidak terserap oleh sektor formal, mengalihkan perhatian pada sektor informal.

Dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini, sektor informal dipandang sebagai katup pengaman dalam menampung ledakan angkatan kerja walaupun dalam berbagai keterbatasannya, namun merupakan kekuatan penyangga dalam kehidupan perekonomian dewasa ini. Selama ini sektor formal memang diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi perekonomian negara, namun di pihak lain ketidakmampuan sektor ini menyerap tenaga kerja telah menimbulkan perbedaan pendapatan yang makin tinggi di antara warga masyarakat.

Sektor formal sebagai sektor ekonomi yang mendapat banyak perlindungan dan bantuan dari pemerintah, dirasa kurang mampu membuka kesempatan kerja yang lebih banyak bagi angkatan kerja. Meskipun penyediaan kesempatan kerja oleh sektor formal terbuka untuk umum, namun kenyataannya kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan khusus yang tidak banyak dimiliki oleh sebahagian pencari kerja. Dengan kata lain, kondisi keterampilan tenaga kerja dewasa ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya.

Keterbatasan sektor formal menyerap angkatan kerja, sementara setiap saat barisan angkatan kerja atau pencari kerja makin membengkak, maka jalan yang ditempuh pencari kerja ini ialah memasuki sektor informal sebagai pekerjaan. Menurut Hidayat (2006), sektor informal sebagai alternatif dari keterbatasan sektor formal memiliki karakteristik yakni: kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik,

umumnya sederhana. Dengan demikian dapat dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau usaha bersama antara beberapa orang atas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, pada umumnya tidak mempunyai izin usaha, pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerjanya, tidak terkena langsung kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah, unit usaha mudah beralih antar sub sektor, berteknologi sederhana, skala usaha relatif kecil, modal usaha, modal kerja dan penjualan umumnya kecil, kurang memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan pengalaman sambil bekerja, umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu pekerja keluarga yang tidak dibayar, bermodal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi serta sebahagian hasil produksi dan jasa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah serta sebahagian kecil masyarakat golongan menengah.

Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga kerja Kota Ambon, diketahui bahwa angkatan kerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah bagi para angkatan kerja, karena kesempatan kerja di sektor formal tidak mampu menyerap mereka secara keseluruhan.

Studi sektor informal diprakarsai oleh "Keith Harth", seorang antropolog Inggris melalui studinya di Ghana Afrika. Gagasan ini dikemukakan berdasarkan pengalaman mengenai kegiatan penduduk Accra dan Nima. Kemudian membedakan antara sektor formal dan informal atas dasar keteraturan kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, status hukum kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya dikemukakan bahwa perbedaan kesempatan memperoleh penghasilan antara sektor formal dan informal pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan dari usaha sendiri. Inti perbedaan terletak pada tingkat rasionalisasi pekerjaan yaitu apakah bekerja atas dasar gaji tetap yang permanen dan teratur atau tidak (Harth, 1972).

Sejak isitilah ini diintroduksi oleh Harth, banyak timbul perhatian dari para ilmuwan untuk menyoroti masalah ini. Dari hasil penelitian ILO (*International Labour Organization*), yang meneliti 7 negara dunia ketiga yaitu Nigeria, Ghana, Kolombo, Jakarta, manila, Kordoba dan campinas, menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, modal usaha rendah serta memberikan kemungkinan mobilitas vertikal (Manning dan Effendi, 2005).

Zethurman (1978) dalam Nasution (2007) merumuskan definisi sektor informal sebagai berikut : " sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan baginya masing-masing dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh faktor modal dan keterampilan.

Selanjutnya Evers (Prisma No.5, 1991) bahwa sektor informal merupakan kegiatan dari "ekonomi bayangan" yang beroperasi dalam unit-unit kecil dengan aktifitas barang dan jasa yang menawarkan efisiensi pelayanan, di mana sektor ini berada dalam subsistem (*sub system production*). Yang dimaksudkan ekonomi bayangan adalah seluruh kegiatan yang bersifat ekonomi dan tidak terlihat oleh statistik resmi pemerintah dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan pajak maupun peraturan pemerintah.

Lanjut dikemukakan oleh Meier dan Baldwin (2005), bahwa keberadaan sektor informal berdampingan dengan sektor formal dapat menimbulkan terjadinya dualisme dalam perekonomian. Oleh karena di lain pihak sektor formal mendapat perhatian yang besar dari perkembangannya sementara sektor informal dilecehkan.

Kapasitas sektor formal dalam penyerapan angkatan kerja adalah terbatas. Hal ini disebabkan karena sektor ini dalam membuka kesempatan kerja membutuhkan syarat-syarat keterampilan khusus dimana sebahagian besar pencari kerja tidak memilikinya. Dengan kata lain, kondisi keterampilan sebahagian besar angkatan kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan pada sektor formal. Angkatan kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, mengalihkan perhatiannya pada sektor informal. Mereka masuk ke sektor informal karena didorong oleh berbagai alasan, antara lain karena terpaksa, dianggap sektor ini tidak memerlukan modal yang besar, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, cara pendirian mudah, organisasi sederhana dan pendapatan di sektor ini dianggap memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, timbul pertanyaan bagaimana tingkat pemanfaatan tenaga mereka, apakah memadai atau kurang memadai. Untuk mengetahui apakah memadai atau kurang memadai, maka diadakanlah pendekatan dari segi pendapatan, jam kerja dan pendidikan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder atas suatu unit usaha yang kasusnya terbatas. Metode penentuan sampel adalah sampel acak berstrata dengan terlebih dahulu membuat penggolongan populasi menurut ciri tertentu dan setelah itu ditentukan jumlah sampel dengan sistem pemilihan secara acak sebanyak 211 orang, yang terdiri dari : penjual sari laut 16 orang, penjual minuman 109 orang, Penjual buah 41, penjual bakso 45 orang. Data dianalisis secara kuantitatif, dimana untuk mengetahui tingkat pemanfaatan angkatan kerja pada sektor informal yang diteliti, digunakan pendekatan dari teori "*Labor Utilization Approach*".

Hasil dan Pembahasan

1. Pendekatan Dari Segi Pendapatan

Mengenai pendekatan dari segi pendapatan telah diajukan tolok ukur ialah Rp. 3.287,67 perkapita/hari atau Rp. 5.790,-perkapita/hari. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila pendapatan perorang dalam satu hari sama atau kurang dari Rp. 3.287,67 atau Rp. 5.790,- dianggap tidak memadai dan di atas jumlah tersebut dianggap memadai. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapatlah disusun tabel berikut :

Tabel 1.
Pendapatan Rata-rata Perorang per hari Tiap Jenis Usaha dengan
Memperhatikan Tanggungan

No.	Jenis Usaha	Pendapatan (Rp.)
1.	Penjual Bakso	150.000
2.	Penjual buah	50.000
3.	Penjual Sari Laut	200.000
4.	Penjual Minuman	100.000

Sumber : Data Primer, 2017

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka rata-rata pendapatan perorang perhari dengan memperhitungkan tanggungan adalah Rp. 45.454,-. Besarnya pendapatan rata-rata perorang perhari tanpa memperhitungkan tanggungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Pendapatan Perorang per hari Rata-rata Tiap Jenis Usaha Tanpa Memperhatikan Tanggungan

No.	Jenis Usaha	Pendapatan (Rp.)
1.	Penjual Bakso	150.000
2.	Penjual buah	75.000
3.	Penjual Sari Laut	250.000
4.	Penjual Minuman	125.000

Sumber : Data Primer, 2017

Besarnya rata-rata pendapatan perorang perhari tanpa memperhitungkan tanggungan adalah Rp.150.000,-. Dari uraian-uraian di muka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi pendapatan, maka usaha pekerja sektor informal berada dalam keadaan “pemanfaatan yang memadai”. Hasil kesimpulan ini semata-mata berdasarkan kriteria garis kemiskinan dari Sajogyo dan Supranto.

2. Pendekatan dari Segi Jam Kerja.

Dari segi jam kerja telah diajukan tolok ukur pemanfaatan yang memadai ialah 7 jam perhari. Kurang dari jam kerja ini dianggap pemanfaatan “kurang memadai”. Berapa besar rata-rata jam kerja perorang setiap kelompok jenis usaha, dapat dilihat pada perhitungan berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{- Penjual bakso adalah } \frac{413 \text{ jam}}{60} = 7 \text{ jam} \\
 & \text{- Penjual buah adalah } \frac{422}{60} = 7 \text{ jam} \\
 & \text{- Penjual Minuman adalah } \frac{543}{60} = 9 \text{ jam} \\
 & \text{- Penjual Sari Laut adalah } \frac{672}{60} = 11 \text{ jam}
 \end{aligned}$$

Dari data tersebut di atas dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 3.
Jam Kerja Rata-rata Perorang Setiap Jenis Usaha Sektor Informal

No.	Jenis Usaha	Rata-rata Jam Kerja
1.	Penjual Bakso	7
2.	Penjual Buah	7
3.	Penjual Sari Laut	11
4.	Penjual Minuman	9

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa dilihat dari sudut jam kerja, maka pekerja sektor informal berada dalam keadaan “pemanfaatan yang memadai”. Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penjual bakso dan penjual buah rata-rata memulai penjualan pada pukul 17.00 sore hingga pukul 23.00 malam. Biasanya konsumen terbanyak pada pukul 19.00 malam dan mulai berkurang pada pukul 22.00, dimana pada saat itu juga, dagangan sudah mulai berkurang.

Untuk penjual minuman, rata-rata memulai penjualan pada pukul 17.00 sore dan berakhir 01.00 dinihari. Konsumen terbanyak biasanya pada menjelang tengah malam, yakni pukul 23.00, dimana konsumen adalah mereka yang datang hanya sekedar menikmati secangkir kopi panas ataupun segelas juice.

Lain halnya dengan penjual sari laut yang justru ramai pada saat dinihari, yakni pukul 24.00 – 03.00, sehingga mereka bertahan menjual hingga 11 jam lamanya. Hal ini dikarenakan lebih banyak konsumen memilih menikmati hidangan sari laut di waktu-waktu tersebut. Adapun yang mempengaruhi jam kerja pada setiap jenis usaha antara lain :

a. Tingkat Pendapatan

Ada kecenderungan penjual akan memperpendek jam kerjanya apabila dia merasa bahwa pendapatannya pada hari tersebut dianggap sudah memadai, hingga waktu luangnya akan lebih banyak (*leisure time*). Hal ini dapat dilihat pada jenis usaha penjual bakso dan buah. Rata-rata jumlah jam kerja mereka 7 jam perhari. Pendapatan mereka memang termasuk rendah dibandingkan penjual minuman dan penjual sari laut, akan tetapi bila dibandingkan dengan rata-rata modal yang dikeluarkan setiap hari, juga lebih kecil. Demikian pula halnya dengan penjual minuman dan penjual sari laut yang membutuhkan modal yang lebih besar setiap harinya.

b. Lokasi / Tempat Penjualan

Ada jenis usaha yang lokasi / tempat penjualannya ditentukan oleh pemerintah, dimana lokasi tersebut hanya dapat dipergunakan pada jam tertentu saja yakni jam 16.00 sore – 05.00 pagi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi jam kerja, maka pekerja sektor informal berada dalam keadaan “pemanfaatan yang memadai”.

3. Pendekatan dari Segi Pendidikan

Pendekatan dari sudut pendidikan telah diajukan tolak ukur ialah bagi mereka yang bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah dianggap “pemanfaatan yang memadai” sedang yang berpendidikan diatas SMP, dianggap pemanfaatan yang “kurang memadai”. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, maka tingkat pendidikan pekerja sektor informal yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Distribusi Pekerja Sektor Informal Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Usaha								Total	
		P. Bakso		P. Buah		P. Sari Laut		P. Minuman			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	SD	-	-	5	38,46	-	-	-	-	5	7,57
2.	SMTp	6	42,85	6	46,15	1	20	3	8,82	16	24,24
3.	SMTA	8	57,15	2	15,39	4	80	19	55,88	33	50,00
4.	SARJANA	-	-	-	-	-	-	12	35,3	12	18,19
	JUMLAH (N)	14	100	13	100	5	100	34	100	66	100

Sumber : Data Primer, 2017 .

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa bagi yang berpendidikan SD ke bawah, semuanya bekerja pada jenis usaha penjual buah sebanyak 5 orang atau 38,46 persen. Yang berpendidikan SMP umumnya bekerja pada jenis usaha “penjual bakso” dan “penjual buah”, masing-masing 42,85% dan 46,15%. Yang berpendidikan SMA ke atas, umumnya bekerja pada jenis usaha “penjual sari laut” dan “penjual minuman”, masing-masing 80,00% dan 55,88%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja sektor informal sebahagian besar berpendidikan SMP ke bawah (± 57,57%).

Berdasarkan tolak ukur seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa bagi mereka yang bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah di anggap “pemanfaatan yang memadai”. Selain itu, ada suatu fenomena dimana 35,3 % penjual minuman adalah sarjana. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pendidikan mereka cukup tinggi, namun mereka tidak terserap di sektor-sektor formal. Berdasarkan hal ini maka pekerja sektor informal jika dilihat dari sudut tingkat pendidikan berada dalam keadaan “ pemanfaatan yang memadai”, (*utilized adequately*).

Bagi pekerja sektor informal yang berpendidikan SMA ke atas dan umurnya berkisar 25 tahun sampai 40 tahun, umumnya akan pindah bekerja pada sektor formal apabila mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya (ijazahnya) utamanya menjadi pegawai negeri, walaupun mereka tahu bahwa pendapatan pada sektor formal lebih rendah dari pendapatannya di sektor informal. Bagi mereka bekerja pada sektor informal hanyalah sebagai “terminal” saja sebelum mendapatkan pekerjaan pada sektor formal. Masuknya mereka bekerja pada sektor informal karena unsur “keterpaksaan”. Sebaliknya bagi mereka yang berpendidikan SMP keatas, mereka merasa sudah puas dengan pekerjaan sekarang.

Dari keadaan ini memberikan suatu informasi bahwa untuk bekerja secara tekun pada sektor informal ditentukan juga antara lain oleh tingkat pendidikan. Nampaknya bahwa apabila pendidikan lebih tinggi maka ketekunan bekerja pada sektor informal lebih rendah. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja sektor informal dalam menggeluti pekerjaannya baik dilihat dari segi pendapatan, jam kerja maupun dari segi pendidikan berada dalam keadaan “pemanfaatan yang memadai”.

4. Alasan Pekerja Sektor Informal Untuk Bekerja pada Sektor Informal

Sektor informal ditinjau dari sudut penyerapan angkatan kerja cukup mempunyai peranan. Banyaknya angkatan kerja memasuki sektor ini tentulah disebabkan oleh berbagai alasan. Sesuai dengan hasil penelitian, maka alasan untuk memasuki sektor ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Alasan Pekerja Sektor Informal Memasuki Sektor Informal

No.	Faktor Penarik	P. Bakso		P. Buah		P. Sari Laut		P. Minuman	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Tidak memerlukan modal yang besar	2	8,33	5	33,33	1	14,28	1	2,63
2.	Tidak membutuh-kan pendidikan yang tinggi	6	25,00	1	6,67	1	14,28	-	-
3.	Cara pendirian yang mudah	2	8,33	1	6,67	-	-	1	2,63
4.	Organisasi yang sederhana	-	-	1	6,67	-	-	-	-
5.	Pendapatan yang dianggap memadai	10	41,67	4	26,66	5	71,44	4	10,52
6.	Kemandirian	4	16,67	2	13,34	-	-	4	10,52
7.	Terpaksa	-	-	1	6,67	-	-	24	63,15
8.	Pengaruh teman / famili	-	-	-	-	-	-	4	10,52
	JUMLAH (N)	24	100	15	100	7	100	38	100

Sumber : Data Primer, 2017

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa alasan mereka yang dominan masuk bekerja pada sektor informal adalah “pendapatan yang dianggap memadai” dan “terpaksa” yakni 71,44 % dan 63,15 %.

Yang mempunyai alasan “pendapatan yang dianggap memadai” adalah kelompok jenis usaha “penjual buah” dan “penjual sari laut”, masing-masing 41,67 persen dan 71,44 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena kedua kelompok jenis usaha ini mempunyai tingkat pendapatan yang cukup memadai. Sedang untuk kelompok “penjual bakso” dan kelompok “penjual buah” alasan yang dominan ialah karena tidak memerlukan modal besar dan pendidikan tinggi.

Untuk penjual minuman dominan “terpaksa” sebesar 63,15 persen, karena rata-rata dari mereka adalah berpendidikan sarjana. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini (SMA ke atas), maka mereka menganggap bahwa bekerja disektor ini hanyalah sebagai terminal saja, dengan kata lain mereka bekerja tidak sepenuh hati akibatnya ialah kemampuan yang dimilikinya tidak digunakan sepenuhnya, hal ini menyebabkan tingkat produktivitas adalah rendah.

Kalau uraian tersebut di atas lebih sederhana, dimana pekerja sektor informal dalam memasuki sektor informal hanya dibagi dua yaitu “yang terpaksa” dan “sukarela” maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 5. dari tabel tersebut nampak bahwa

pekerja disektor informal yang berpendidikan sarjana sebanyak 91,66 persen dari mereka itu beralasan karena “terpaksa” hanya 8,34 persen yang sukarela. Sebaliknya yang berpendidikan SD atau kurang, maka 100 persen dari mereka itu beralasan sukarela. Demikian pula yang mempunyai tingkat pendidikan SMP 87,50 persen beralasan sukarela, hanya 12,5 persen yang beralasan terpaksa.

Tabel 6.

Alasan Umum Pekerja Sektor Informal Dalam Memasuk Sektor Informal

No.	Pendidikan	Terpaksa		Sukarela		Total	
		F	%	F	%	F	%
1.	<SD	-	-	5	100	5	13,2
2.	SMTP	2	12,5	14	87,5	16	24,24
3.	SMTA	10	30,30	23	69,7	33	50,00
4.	SARJANA	11	91,66	1	8,34	12	18,18
JUMLAH (N)		23	100	43	100	66	100

Sumber : Data Primer, 2004

3. Masalah yang Dihadapi Dalam Pengembangan Usaha

Masalah yang dihadapi sektor informal, nampaknya berbeda pada setiap jenis usaha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada jenis usaha penjual bakso, yang menjadi masalah utamanya adalah “pemasaran hasil”, 57,15 persen dari responden kelompok ini mempermasalahkan hal ini.

Timbulnya masalah ini disebabkan antara lain :

- Makin banyak orang memasuki jenis pekerjaan ini, sehingga timbullah persaingan, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya masalah pemasaran. Makin banyaknya orang memasuki bidang usaha ini disebabkan karena tidak memerlukan modal yang besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut di atas dimana faktor modal tidaklah terlalu merupakan masalah.
- Bahan mentah yang dipakai umumnya mempunyai resiko tinggi, dimana bahan tersebut harus habis pada hari itu. Kalau tidak akan busuk dan hal ini merupakan kerugian.

Tabel 7.

Masalah Pada Berbagai Jenis Usaha

No	Masalah	P. bakso		P. Buah		P. Sari Laut		P. Minuman	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Kekurangan Modal	1	5,88	7	46,67	5	50,00	22	55,00
2.	Tempat Usaha	5	29,41	4	26,67	-	-	10	25,00
3.	Keterampilan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pemasaran Hasil	11	64,71	1	6,67	5	50,00	4	10,00
5.	Peraturan Pemerintah	-	-	1	6,67	-	-	-	-
6.	Pungutan-pungutan	-	-	1	6,67	-	-	-	-
7.	Bahagian Penertiban Kota	-	-	1	6,67	-	-	4	10,00
JUMLAH		17	100	15	100	10	100	40	100

Sumber : Data Primer, 2017

Disamping masalah pemasaran hasil, maka masalah lain yang dihadapi jenis usaha penjual bakso adalah “kekurangan modal” dan “tempat usaha”. Dari 17 jawaban responden pada sektor usaha ini, 29,41 persen mempermasalahkan tempat usaha, sedang 5,88 persen mempermasalahkan modal. Sebagian dari mereka belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah kota mengenai tempat usahanya. Akibatnya mereka sering diusir dari lokasi tempat usahanya.

Pada jenis usaha penjual buah, masalah yang cukup menonjol yang dihadapi adalah masalah “kekurangan modal”, “tempat usaha”, dan bahagian penertiban kota”, masing-masing 46,67 persen; 26,67 persen dan 6,67 persen. Timbulnya masalah dari Dinas Penertiban Kota disebabkan sebagian mereka belum mendapat izin resmi dari pemerintah kota.

Pada jenis usaha penjual sari laut, maka masalah utama yang dihadapi ialah masalah “modal” dan pemasaran hasil masing-masing 50 persen dari responden jenis usaha ini memberikan jawaban tentang masalah kekurangan modal. Timbulnya masalah ini disebabkan karena untuk usaha ini diperlukan modal yang cukup besar yakni berkisar Rp. 2.500.000 keatas.

Pada jenis usaha “penjual minuman”, masalah utama yang dihadapi ialah “kekurangan modal” dan “tempat usaha” masing-masing 55,00 persen dan 25 persen. Sedang masalah “tempat usaha” secara keseluruhan, mereka ini belum mempunyai lokasi resmi dari pemerintah. Karena tidak adanya izin resmi dari pemerintah maka mereka sering diusir oleh Dinas Penertiban Kota.

Dari berbagai masalah yang dihadapi sektor informal seperti apa yang telah dikemukakan di atas, maka secara keseluruhan “masalah kekurangan modal”, “masalah tempat usaha” dan “masalah pemasaran” merupakan masalah yang menonjol. Dalam penelitian ini juga dijumpai bahwa pekerja sektor informal umumnya belum mempunyai wadah kebersamaan, sehingga tidak ada organisasi yang merupakan wadah dalam memperjuangkan kepentingannya. Untuk itu dalam rencana pembinaan sektor informal ini diperlukan adanya lembaga formil yang dapat membantu pembinaan secara menyeluruh. Salah satu wadah kebersamaan tersebut ialah “koperasi”. Dalam hal ini para pekerja sektor informal yang sejenis membentuk koperasi-koperasi primer. Dengan adanya koperasi ini diharapkan masalah-masalah yang dihadapi secara bertahap dapat diatasi.

Koperasi ini diharapkan berfungsi antara lain :

- a. Menjadi perantara antara sektor informal, pemerintah dan lembaga lainnya. Misalnya dalam hal perizinan tempat / kegiatan usaha, maka koperasi ini merupakan wadah yang cukup potensial untuk memperjuangkan izin kepada pemerintah untuk anggotanya. Demikian pula dalam hal mendapatkan kredit bank, maka koperasi ini cukup potensial dalam mendapatkan kredit bagi para anggotanya.
- b. Dapat merupakan wadah pembinaan anggota dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang usaha, organisasi, manajemen, marketing, permodalan dan lain-lainnya.
- c. Dapat mempertegas keberadaan dan kedudukan sektor informal dalam struktur ekonomi masyarakat.

Kesimpulan

Sektor informal baik dilihat dari sudut pendapatan, jam kerja, maupun pendidikan, berada dalam keadaan “pemanfaatan yang memadai”. Pekerja sektor informal dalam melaksanakan usahanya telah mendapatkan sejumlah pendapatan yang mereka pergunakan untuk menghidupi keluarganya dan melanjutkan usahanya. Sektor informal dalam mempertahankan eksistensinya menghadapi berbagai masalah. Masalah yang cukup menonjol ialah masalah kekurangan modal, tempat usaha, dan pemasaran hasil.

Referensi

Evers, 1991. Ekonomi Bayangan, Produksi dan Sektor Informal. Prisma No. 5, Jakarta.

Harth, Keith. 1972. Sektor Informal Cds. Manning C. dan Effendi, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Gramedia, Jakarta.

Hidayat. 2006. Situasi Pekerjaan, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal. Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja. BPS, Jakarta.

Manning C. dan Effendi. 2005. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Gramedia, Jakarta.

Meier dan Baldwin .2005. *Labour Economics Theory and Guinane*. Prentice Hall Inc Engleword, New Yersey.

Nasution. 2007. Sektor Informal, Persepsi dan Refleksi. CV Rajawali, Jakarta.